

## Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung

Ega Santika<sup>1</sup>, Amelia Anwar<sup>2</sup>, Astrid Aprica Isabella<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Mitra Indonesia

E-mail: [egasantika9@gmail.com](mailto:egasantika9@gmail.com)<sup>1</sup>, [ameliaanwar@umitra.ac.id](mailto:ameliaanwar@umitra.ac.id)<sup>2</sup>, [astrid@umitra.ac.id](mailto:astrid@umitra.ac.id)<sup>3</sup>

### Article History:

Received: 01 September 2024

Revised: 26 September 2024

Accepted: 29 September 2024

**Keywords:** *Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Regional Expenditures.*

**Abstract:** *This study aims to determine the effect of Regional Original Revenue, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds affecting Regional Expenditures in the Provinces of Lampung. This type of research is quantitative research. The Saturated Sampling Method was used in selecting a sample of 15 districts/cities in Lampung 2018-2022 periode, the technique of selecting samples in this study uses purposive sampling method with the amount of data that is processed as many as 75. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis with SPSS version 25. Based on the results of the study it is known that Local Own Revenue, Special Allocation Funds have and General Allocation Funds have a positive effect Partially on Regional Expenditures. Simultaneous tests show the results that the variables Regional Original Income, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds jointly affect Regional Expenditures.*

### PENDAHULUAN

Dalam menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasari oleh pemikiran bahwa pemerintah daerah jauh lebih memahami potensi, kondisi, dan permasalahan daerahnya sendiri. Oleh sebab itu, setiap daerah juga lebih mengerti besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan (Devita et al., 2014). Anggaran daerah adalah rencana keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengatur pelayanan publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk menggambarkan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah semua hal yang diterima dan dikeluarkan oleh pemerintah daerah, baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, dan harus dicatat. APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah secara umum merupakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Selisih antara pendapatan

dan belanja daerah disebut Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Jika pendapatan lebih besar dari belanja maka disebut SiLPA dan jika pendapatan lebih kecil dari belanja maka disebut SiKPA (Yuliani & Suhana, 2023). Berlakunya Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintahan pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari DAU, DAK, dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Tujuan dari transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik (Yuliani & Suhana, 2023). Berikut data Realisasi PAD, DAU, DAK dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Realisasi PAD, DAU, DAK dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 – 2022**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Belanja Daerah
2018	2,864,235,753,079	1,854,701,094,160	745,585,220,581	7,538,988,966,120
2019	3,018,067,291,160	1,906,780,297,000	581,870,716,694	7,058,713,889,024
2020	2,842,286,479,070	1,732,551,921,000	571,540,325,831	6,967,358,448,183
2021	3,249,669,847,265	1,726,296,248,000	2,232,553,877,000	7,097,651,401,591
2022	3,678,302,294,581	1,719,175,461,000	1,251,722,522,000	6,786,374,070,613

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Realisasi PAD, DAU, DAK dan Belanja Daerah Provinsi Lampung tidak stabil di setiap tahunnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor pendapatan daerah yang dominan terhadap belanja daerah dari tahun 2018 hingga 2022. Penelitian ini menganalisis PAD, DAK, dan DAU dari 15 Kabupaten/Kota yang termasuk dalam sampel Provinsi Lampung. Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “ **PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG** ”.

## LANDASAN TEORI

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 pasal 1 ayat 4 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan

dengan peraturan daerah atau perda.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Setiap penganggaran penerimaan dan pengeluaran dalam APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Majid, n.d,2019).

### ***Pendapatan Asli Daerah ( PAD )***

Pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. PAD merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa sumber- sumber penerimaan daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah adalah dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari setiap pemungutan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah harus berdasarkan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang, Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan 16 Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Kebijakan dalam rangka peningkatan PAD ditempuh dengan rasionalisasi sistem dan prosedur, law enforcement pengawasan yang efektif, kemudahan pelayanan, sehingga tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

### ***Dana Alokasi Umum ( DAU )***

Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum yang disingkat DAU merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer umum (General Purpose Grant) adalah dana yang bersumber dari APBN yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakannya dalam membiayai atau mendukung pelaksanaan desentralisasi. Besaran DAU ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 sedikitnya 26% dari pendapatan dalam negeri (PDN) netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi sebesar 10% sedangkan untuk daerah kabupaten atau kota sebesar 90%.

### ***Dana Alokasi Khusus ( DAK )***

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 48 yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan 21 tujuan guna menopang mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah yang menyatakan bahwa dana transfer khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Dana transfer khusus (Specific Purpose Grant) dibagi menjadi dua jenis yaitu dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik. DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Siregar,2017).

### ***Belanja Daerah***

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004, Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, baik berupa urusan wajib maupun urusan pilihan. Belanja daerah dipisahkan atas jenis, organisasi dan fungsi. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dan rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 23 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan informasi statistika, Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan juga sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan ( Sugiyono, 2015). Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung Data Tahun 2018 - 2022 yang diperoleh peneliti melalui internet atas arahan dari pihak Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Analisis Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan_Asli_D aerah	75	167574843 36	6459654337 02	14030203077 9.87	139942186624. 797
Dana_Alokasi_Um um	75	4020021380 00	1378175214 000	71742830188 0.00	269109198705. 013
Dana_Alokasi_Khu sus	75	1162226955 48	6630547110 00	25363293071 6.13	100388299005. 215
Belanja_Daerah	75	7686301169 95	2617973753 752	145415296540 6.60	541223726985. 572

Valid N (listwise)	75				
--------------------	----	--	--	--	--

Sumber : Data hasil diolah peneliti menggunakan IBM SPSS 25( 2024 )

Variabel PAD mempunyai nilai minimumnya sebesar Rp 16.757.484.336 diperoleh dari Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022 dan nilai maksimum sebesar Rp 645.965.433.702 diperoleh dari Kota Bandar Lampung pada tahun 2022. Nilai mean sebesar Rp 140.302.030.779,87 dan nilai standar deviasi sebesar Rp 139.942.186.624.797. Variabel DAU mempunyai nilai minimumnya sebesar Rp 402.002.138.000 diperoleh dari Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022 dan nilai maksimum sebesar Rp 1.378.175.214.000 diperoleh dari Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019. Nilai mean sebesar Rp 717.428.301.880 dan nilai standar deviasi sebesar Rp 269.109.198.705.013. Variabel DAK mempunyai nilai minimumnya sebesar Rp 116.222.695.548 diperoleh dari Kota Metro pada tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar Rp 663.054.711.000 diperoleh dari Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2022. Nilai mean sebesar Rp 253.632.930.716,13 dan nilai standar deviasi sebesar Rp 100.388.299.005,215. Variabel Belanja Daerah mempunyai nilai minimumnya sebesar Rp 768.630.116.995 diperoleh dari Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022 dan nilai maksimum sebesar Rp 2.617.973.753.752 diperoleh dari Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2022. Nilai mean sebesar Rp 1.454.152.965.406.60 dan nilai standar deviasi sebesar Rp 541.223.726.985,572.

### Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05075743
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.060
	Negative	-.046
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Data hasil diolah peneliti menggunakan IBM SPSS 25( 2024 )

Hasil pengujian One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dalam tabel 4.2 diatas menunjukkan data pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

### Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>
---------------------------

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.094	.484		2.260	.027		
	Pendapatan_Asl Daerah	.057	.010	.126	5.540	.000	.522	1.915
	Dana_Alokasi_U mum	.755	.032	.751	23.881	.000	.274	3.650
	Dana_Alokasi_Khu sus	.185	.024	.193	7.607	.000	.422	2.370

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Data hasil diolah peneliti menggunakan IBM SPSS 25( 2024 )

Berdasarkan hasil pada tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel Independent.

#### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.475	.288		-1.650	.103
	Pendapatan_Asl Daerah	.002	.006	.046	.286	.775
	Dana_Alokasi_Umu m	.004	.019	.052	.235	.815
	Dana_Alokasi_Khus us	.013	.014	.164	.925	.358

a. Dependent Variable: Abs RES

Sumber : Data hasil diolah peneliti menggunakan IBM SPSS 25( 2024 )

Dari hasil uji Glejser diatas dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas antar variabel Independent.

### Hasil Uji Auto Korelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.990 a	.981	.980	.052	1.806
a. Predictors: (Constant), Dana_Alokasi_Khusus, Pendapatan_Asli Daerah, Dana_Alokasi_Umum					
b. Dependent Variable: Belanja_Daerah					

Sumber : Data hasil diolah peneliti menggunakan IBM SPSS 25( 2024 ).

Berdasarkan hasil dari uji autokorelasi pada tabel 6 dapat di lihat bahwa (dU)  $1,7092 < 1,806$  (d)  $< 2,298$  ( 4-du) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi ini.

### Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 7**  
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	1.094	.484
	Pendapatan Asli Daerah	.057	.010
	Dana Alokasi Umum	.755	.032
	Dana Alokasi Khusus	.185	.024
a. Dependent Variable: Belanja_Daerah			

Sumber : Data hasil diolah peneliti menggunakan IBM SPSS 25( 2024 )

Persamaan regresi linier berganda tersebut bermakna:

Besarnya nilai koefisien konstanta adalah 1,094, hal ini menunjukkan apabila nilai variabel PAD, DAU, dan DAK bernilai 0 maka anggaran Belanja Daerah (Y) akan konstan sebesar 1,094. Dan koefisien konstanta bernilai positif artinya dengan adanya variabel PAD, DAU, dan DAK maka Belanja Daerah (Y) cenderung mengalami peningkatan.

### Hasil Uji Parsial ( Uji T )



Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.094	.484		2.260	.027
	Pendapatan Asli Daerah	.057	.010	.126	5.540	.000
	Dana Alokasi Umum	.755	.032	.751	23.881	.000
	Dana Alokasi Khusus	.185	.024	.193	7.607	.000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Data hasil diolah peneliti menggunakan IBM SPSS 25( 2024 )

Berdasarkan tabel diatas maka dapat ditarik sebagai berikut :

- PAD (X1) dilihat dari nilai Thitung 5,540 > Ttabel 1,665 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Variabel PAD secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).
- DAU (X2) dilihat dari nilai Thitung 23,881 > Ttabel 1,665 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Variabel DAU secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).
- DAK (X3) dilihat dari nilai Thitung 7,607 > Ttabel 1,665 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Variabel DAK secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).

### Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Table 10**  
**Uji Determinan R<sup>2</sup>**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.990 <sup>a</sup>	.981	.980	.052

Sumber : Data hasil diolah peneliti menggunakan IBM SPSS 25( 2024 )

Berdasarkan hasil Uji Koefisien Determinasi ( R<sup>2</sup> ) dapat dilihat pada tabel 10 diketahui



koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,980 lalu diubah menjadi persentase yaitu sebesar 98,0% dipengaruhi oleh variabel independen yang dijelaskan pada penelitian ini yaitu PAD, DAU dan DAK sedangkan 2,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat tiga variabel bebas yaitu PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3) terhadap Belanja Daerah (Y) pada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Dengan hasil sebagai berikut :

### ***4.3.1 Pengaruh PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3) terhadap Belanja Daerah (Y)***

Hasil Uji yang didapat dalam penelitian yaitu PAD, DAU dan DAK memberikan pengaruh terhadap Belanja Daerah. Dalam hal ini nilai R Square didapatkan sebesar 98,0% menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada penelitian ini sangat kuat terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung, hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat PAD , DAU dan DAK maka semakin meningkat juga Belanja Daerah suatu Kabupaten/Kota maupun Provinsi, begitu juga sebaliknya jika variabel X1, X2 dan X3 pada penelitian ini rendah maka variabel Y akan rendah.

Hasil pengujian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ariyanti , Nelly Masnila dan Choiruddin ( 2023 ) menunjukkan Pendapatan Asli Daerah, DAU dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera. Dan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti dan Salmah Pattisahusiwa ( 2018 ) menunjukkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

### ***4.3.2 Pengaruh PAD (X1) Terhadap Belanja Daerah (Y)***

Hasil uji statistik dengan analisis regresi data panel dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hipotesis kedua (H2) membuktikan diterima artinya ada pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap Belanja Daerah.

Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sumber dana PAD diurutkan dari yang paling besar yaitu dihasilkan dari Pendapatan lain-lain yang sah, Pajak daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Retribusi daerah. Alasan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah karena PAD merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang berasal dari sumber-sumber kekayaan dalam wilayah daerah itu sendiri, karena PAD merupakan salah satu indikator untuk menilai kemandirian suatu daerah dan tolok ukur untuk keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dituntut untuk menggali potensi-potensi yang ada di wilayahnya sendiri untuk meningkatkan PAD. Dengan peningkatan PAD, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Hasil pengujian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Joni Fernandes & Lovita Fauziah ( 2022 ) mengemukakan ada pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat .dan penelitian yang dilakukan Haris Fadilah

& Nayang Helmayunita ( 2020 ) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh secara persial terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia.

#### **4.3.3 DAU (X2) Terhadap Belanja Daerah (Y)**

Hasil uji statistik dengan analisis regresi data panel dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hipotesis kedua (H3) membuktikan diterima artinya ada pengaruh yang signifikan antara DAU terhadap Belanja Daerah.

Alasan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah karena setiap DAU yang diterima oleh pemerintah daerah ditujukan untuk mendanai belanja pemerintah daerah, DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah yang dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, belanja hibah, belanja bantuan desa, belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, serta belanja yang tidak disangka.

DAU yang diterima oleh seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dari tahun ke tahun selalu meningkat hal ini juga menyebabkan peningkatan pada Belanja Daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ariyanti , Nelly Masnila dan Choiruddin ( 2023 ) menunjukkan DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera, dan penelitian yang dilakukan Kiki Ninda Apriliawati ( 2016 ) yang menyatakan DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah, karena semakin tinggi DAU yang diperoleh dari pemerintah pusat maka semakin meningkat pula Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

#### **4.3.2 DAK (X3) Terhadap Belanja Daerah (Y)**

Hasil uji nilai statistik dengan analisis regresi data panel dalam penelitian ini untuk variabel DAK membuktikan bahwa H4 diterima artinya ada pengaruh yang signifikan antara DAK terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin besar DAK semakin besar pula belanja daerah yang dikeluarkan dan menggambarkan bahwa daerah tersebut masih bergantung dengan pemerintah pusat, sebaliknya jika DAK rendah maka menunjukkan daerah tersebut mandiri karena dapat mencukupi dana pembangunan dengan pendapatan daerahnya. DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah karena DAK yang diterima oleh pemerintah daerah ditujukan untuk mendanai belanja pemerintah daerah, DAK dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain seperti pembangunan rumah sakit, pendidikan, jalan, pasar, irigasi, dan air bersih. DAK ini bisa disamakan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Joni Fernandes & Lovita Fauziah ( 2022 ) menunjukkan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada 19 Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, penulis menarik kesimpulan atas peneliti yang dilakukan sebagai berikut :

1. PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah
2. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
3. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

4. DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

#### DAFTAR REFERENSI

- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2017. *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB PRESS.
- Apriliawati, K. N. 2016. Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/1558/15>.
- Ariyanti, D., Masnila, N., & Choiruddin. 2023 . Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi di Pulau Sumatera. Volume 6, Nomor 6, p-ISSN: 2620-8490; e-ISSN: 2620-8814. p-ISSN: 2620- 8490; e-ISSN:2620-8814. <https://cakrawala.imwi.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/421/501>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung. *Statistik Keuangan Provinsi Lampung*. Berbagai Edisi Penerbitan. Lampung.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung. *Lampung Dalam Angka. 2018*. Lampung. Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung. *Lampung Dalam Angka. 2019*. Lampung. Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung. *Lampung Dalam Angka. 2020*. Lampung. Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung. *Lampung Dalam Angka. 2021*. Lampung. Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung. *Lampung Dalam Angka. 2022*. Lampung
- Badrudin, R. 2017 . *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Buku Panduan Penulisan Skripsi / Tugas Akhir Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia 2023 - 2024.
- Deddi Nordiawan. 2017. *Anggaran Disuatu Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi, J. 2014 . Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DAU dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63–70 <https://doi.org/10.22437/ppd.v2i2.2255>.
- Faris, N. Helmayunita. 2020 . Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/27>
- Fauziah, Ifat. 2018 . *Buku Standar Akuntansi Pemerintah*. Tangerang: Ilmu Media.
- Fernandes, J., & Lovita. F. 2022 . Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. 2017-2020. Vol. 3, No. 1. <https://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/101/90>
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang. <https://lampung.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataK>

- unci%5D=lampung+dalam+angka&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&Publikasi%5BcekJudul%5D=1&yt0=Tampilkan. Diakses pada 05 Februari 2024  
<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>. Diakses pada 04 Februari 2024.  
<https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>.  
 Diakses pada 22 Maret 2024.  
<https://lampung.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=keuangan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&Publikasi%5BcekJudul%5D=1&yt0=Tampilkan>. Diakses pada 05 Februari 2024.
- Profil BPS - Portal PPID BPS Provinsi Lampung (bps.go.id). diakses pada 14 Maret 2024.
- Majid, J. (n.d.). *Akuntansi Sektor Publik*. Sulawesi Selatan: Penerbit Pusaka Almailda.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta : Andi.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Rihfenti Ernayani. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). VOL. 1 NO.1. <https://jurnal.poltekba.ac.id/index.php/jsh/article/view/234/173>
- Situmorang, D., Anwar, A., & Isabella, A. A. (2022). the Effect of Land and Building Rights Acquisition Duty (Bphtb) and Groundwater Tax on Regional Income of Bandar Lampung City 2016-2020. *Peradaban Journal of Economic and Business*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.59001/pjeb.v1i1.3>
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan kombinasi (MIXED METHODES)*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2018. “ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta”.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syofian Siregar. 2017. “ *Metode Penelitian Kuantitatif (Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Spss)*”.
- V. Wiratna Sujarweni. 2018. “*Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*”. Yogyakarta: Pustaka Baru Press”.
- Yuliani, D., & Suhana, S. 2023. Pengaruh Kepemimpinan Dan Keadilan Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi. *Jesya*, 6(1), 61–78. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.839>